



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Tuban Jawa Timur Telepon (0356) 321020 Kode Pos 62311
Pos-el bkpsdm@tubankab.go.id Laman <https://tubankab.go.id>

Tuban, 27 Agustus 2026

Nomor : 800.1.2.2/ 6187 /414.203/2026
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Surat Pengantar Pengumuman

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
di
Tuban

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Agustus 2026 Nomor 800.1.2.2/5875/SJ tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026, bersama ini disampaikan Pengumuman Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026 sebagaimana terlampir, untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui media elektronik pada instansi Saudara.

Demikian untuk dilaksanakan

Sekretaris Daerah

Budi Wiyana



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 800.1.2.2/5875/SJ

TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2026

Berkenaan dengan Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026, disampaikan:

1. SPCP IPDN Tahun 2026 dilaksanakan melalui:
 - a. pendaftaran peserta Calon Praja IPDN Tahun 2026 secara bersamaan dengan pendaftaran calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni pendidikan tinggi kedinasan pada tanggal 18 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026;
 - b. pendaftaran dilakukan secara *online*/dalam jaringan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>; dan
 - c. persyaratan, jadwal, lokasi pelaksanaan tes, perubahan jadwal tahapan seleksi dan informasi lain pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.
2. Menyebarkan informasi, melaksanakan sosialisasi, dan memfasilitasi pendaftaran dalam rangka kelancaran pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2026 dengan menugaskan Camat dan Lurah untuk memasang brosur dan banner sebagaimana terdapat pada laman <https://spcp.ipdn.ac.id>.
3. Pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2026 pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SKD dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tata cara pembayaran dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> sesuai kode *billing* yang dikeluarkan oleh BKN.
4. Biaya SPCP IPDN Tahun 2026 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026.

5. Dalam hal terdapat pihak/oroknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi Calon Praja IPDN Tahun 2026 dengan meminta imbalan tertentu, perbuatan tersebut merupakan tidak benar dan termasuk dalam delik penipuan.
6. Pengaduan atas proses pendaftaran dan pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2026 disampaikan melalui:
 - a. *Call Centre* SPCP IPDN Nomor 0852-1868-2405 pada hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB selama masa pendaftaran SPCP IPDN; dan
 - b. *Email* spcpipdn@ipdn.ac.id dan/atau humas@ipdn.ac.id selama pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2026.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2026

Menteri Dalam Negeri,
ttd
Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta;
5. Panglima Tentara Negara Indonesia di Jakarta; dan
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 800.1.2.2/5875/SJ
TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN
CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI TAHUN 2026

I. PERSYARATAN PESERTA

1. Persyaratan umum:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. usia peserta seleksi minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Januari 2026; dan
- c. tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm.

2. Persyaratan administrasi:

- a. Berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan bukan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan serta bukan lulusan Paket C, dengan ketentuan nilai rata-rata ijazah minimal 73,00 (tujuh puluh tiga koma nol-nol), hal ini dikecualikan bagi pendaftar Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya dengan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 (enam puluh lima koma nol-nol);
- b. Untuk yang berijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan berupa surat pernyataan/persamaan dari kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. Bagi siswa SMA/MA lulusan Tahun 2026 yang belum menerima ijazah pada saat mendaftar, menggunakan Surat Keterangan Lulus yang mencantumkan hasil penilaian akhir kelas XII SMA/MA dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang serta dicap/distempel basah;
- d. Hasil penilaian mata pelajaran Bahasa Inggris pada Ijazah/Surat Keterangan Lulus minimal 75,00 (tujuh puluh lima koma nol-nol) hal ini dikecualikan bagi pendaftar Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

e. Ketentuan domisili yaitu:

- 1) peserta berdomisili minimal 1 (satu) tahun sampai dengan waktu pendaftaran di Kabupaten/Kota pada Provinsi tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Kartu Identitas Anak bagi yang belum berusia 17 tahun (terhitung mulai tercatat di domisili baru); dan
- 2) bagi peserta yang berdomisili kurang dari 1 (satu) tahun di Kabupaten/Kota pada Provinsi tempat mendaftar, dapat mendaftar dengan persyaratan:
 - a) bersekolah SMA/MA di Kabupaten/Kota pada Provinsi tempat kelulusan dibuktikan dengan Ijazah/Surat Keterangan Kelulusan; atau
 - b) orang tua kandung berasal dari Kabupaten/Kota pada Provinsi tempat pendaftaran dibuktikan dengan Akta Kelahiran orang tua; atau
 - c) orang tua kandung melaksanakan tugas negara di Kabupaten/Kota pada Provinsi tempat pendaftaran dibuktikan dengan Surat Tugas atau Penempatan Tugas orang tua terakhir.

f. Bagi peserta yang merupakan Orang Asli Papua (OAP) dengan melampirkan surat keterangan OAP yang ditandatangani oleh Ketua atau Anggota Majelis Rakyat Papua yang dicap/stempel basah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pakta Integritas Tahun 2026;

h. Alamat surat elektronik/e-mail yang aktif; dan

i. Pasfoto berwarna berukuran foto 4x6 cm dengan latar belakang merah, menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos.

3. Persyaratan lain:

Bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi, harus memenuhi persyaratan lain:

- a. Tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan.
- b. Tidak bertato, bagi peserta pria tidak bertindik dan tidak mempunyai bekas ditindik pada telinga dan pada bagian tubuh lainnya kecuali karena ketentuan agama/adat;
- c. Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak;
- d. Belum pernah menikah, bagi peserta wanita belum pernah hamil/melahirkan;

- e. Belum pernah diberhentikan sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atau belum pernah diberhentikan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat;
4. Bagi peserta yang dinyatakan lulus sebagai Calon Praja IPDN:
 - a. Tidak diperkenankan mengundurkan diri;
 - b. Sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan;
 - c. Bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS dan ditugaskan/ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. Bersedia ditempatkan di seluruh kampus IPDN pada saat proses pembelajaran;
 - e. Bersedia menaati segala peraturan yang berlaku di IPDN; dan
 - f. Bersedia diberhentikan sebagai Praja IPDN apabila terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin Praja sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kehidupan Praja.
5. Bagi peserta yang dinyatakan lulus sebagai Calon Praja IPDN dan mengundurkan diri, wajib mengembalikan biaya seleksi yang disetorkan ke kas negara.
6. Apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas/ dokumen persyaratan di atas, maka pendaftar dinyatakan gugur.

II. PENDAFTARAN PESERTA

1. Pendaftaran dilakukan dalam jaringan melalui laman resmi Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) <https://sscasn.bkn.go.id>; dan
2. Mengunggah dokumen persyaratan administrasi peserta dengan ukuran dan format tertentu sesuai dengan aplikasi yang termuat pada laman resmi SSCASN BKN <https://sscasn.bkn.go.id>.

III. JADWAL PELAKSANAAN SPCP IPDN TAHUN 2026

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Pelamar mendaftar secara <i>online/daring</i>	18 Agustus s.d. 30 Agustus 2026	Laman https://sscasn.bkn.go.id/
2.	Pelamar membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan Tahun 2026		

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
3.	Pelamar <i>log in</i> dengan menggunakan NIK dan <i>Password</i> yang telah didaftarkan.		
4.	Pelamar memilih Sekolah Kedinasan dan mengisi biodata serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi SPCP IPDN.		
5.	Pelamar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek <i>resume</i> dan mencetak bukti pendaftaran.		
6.	Verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran yang telah diunggah.	18 Agustus s.d. 1 September 2026	Laman https://sscasn.bkn.go.id/
7.	Pengumuman verifikasi dokumen persyaratan administrasi	2 s.d. 3 September 2026	Laman https://sscasn.bkn.go.id/ dan laman https://spcp.ipdn.ac.id
8.	Masa Sanggah	4 s.d. 5 September 2026	Laman https://sscasn.bkn.go.id/
9.	Jawab Masa Sanggah	4 s.d 6 September 2026	Laman https://sscasn.bkn.go.id/
10.	Pengumuman pasca masa sanggah	7 s.d 8 september 2026	Laman https://sscasn.bkn.go.id
11.	Pelamar yang memenuhi syarat verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melakukan pembayaran PNBP Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai kode <i>billing</i> .	11 s.d.15 September 2026	Bank yang ditunjuk oleh BKN

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
12.	Pengumuman jadwal SKD (lokasi, waktu dan sesi ujian peserta), dan mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing	18 s.d. 21 September 2026	Laman https://sscasn.bkn.go.id/ dan Laman https://spcp.ipdn.ac.id
13.	Pelaksanaan SKD	22 September s.d. 7 Oktober 2026	Lokasi yang ditunjuk Panitia SPCP IPDN
14.	Pengumuman Hasil SKD	Oktober 2026	Laman https://sscasn.bkn.go.id/ dan Laman https://spcp.ipdn.ac.id
15.	Verifikasi faktual tahap I dan Pelaksanaan Gladi Simulasi Tes Kemampuan Bahasa Inggris	Oktober 2026	Lokasi yang ditunjuk Panitia SPCP IPDN
16.	Pelaksanaan Tes Kemampuan Bahasa Inggris	Oktober 2026	Lokasi yang ditunjuk Panitia SPCP IPDN
17.	Pengumuman Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Administrasi Tahap I dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris	Oktober 2026	Laman https://spcp.ipdn.ac.id
18.	Pelaksanaan Tes Kesehatan Tahap I	Oktober 2026	Rumah Sakit Bhayangkara/ Biddokkes Kepolisian Daerah
19.	Pengumuman Hasil Tes Kesehatan Tahap I	Oktober 2026	Laman https://spcp.ipdn.ac.id
20.	Pelaksanaan Gladi Jaringan dan Tes Psikologi,Integritas dan Kejujuran	Oktober 2026	Psikologi Kepolisian Daerah

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
21.	Pengumuman Hasil Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran	Oktober 2026	Laman https://spcp.ipdn.ac.id
22.	Penerimaan peserta dan Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Administrasi Tahap II	Oktober s.d. November 2026	Seleksi Penentuan Akhir di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor
23.	Tes Kesehatan Tahap II		
24.	Tes Kesamaptaan dan Antropometri		
25.	Wawancara		
26.	Pengumuman Hasil Kelulusan Akhir SPCP IPDN Tahun 2026	November 2026	Laman https://spcp.ipdn.ac.id
27.	Registrasi Calon Praja	November 2026	Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor

Catatan:

Peserta diharapkan selalu memantau pembaharuan informasi pelaksanaan SPCP (antara lain perubahan jadwal, lokasi pelaksanaan tes dan informasi lainnya) pada laman <https://spcp.ipdn.ac.id>.

Menteri Dalam Negeri,
ttd
Muhammad Tito Karnavian



Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001